



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 36 TAHUN 2022

• TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian ketentuan yang mengatur mengenai perjalanan dinas;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
  11. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 58);

2020  
7 Am G



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 26 diubah, dan angka 27 dihapus, serta ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 32 dan angka 33, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Far



9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat berangkat ke tempat tujuan dan kembali ketempat berangkatnya semula.
12. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
13. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan pelaksana perjalanan dinas.
15. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, ke luar Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
16. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali Perjalanan Dinas pindah atas permohonan sendiri.
17. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan penugasan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.

7 Ar 1



20. Biaya *Riil* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan *Rampung* adalah perhitungan biaya *Perjalanan Dinas* yang dihitung sesuai kebutuhan *Riil* berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
23. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/Perangkat Daerah.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan *Perjalanan Dinas*.
25. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
26. Kota adalah wilayah administratif Kabupaten Karangasem.
27. Dihapus.
28. Paket *Fullboard* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
29. Paket *Fullday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
30. Paket *Halfday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
31. Paket *Residence* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
32. *Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota* adalah *Perjalanan Dinas* dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta.
33. *Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota* adalah *Perjalanan Dinas* dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan yang dilaksanakan di luar kota dengan paket meeting (*Fullboard/ Fullday/ Halfday*) pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta

JA



dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf h Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, ke luar Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
  - c. pengumandahan (*detasering*);
  - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ Strata 1/ Strata 2/ Strata 3; dan
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digolongkan menjadi:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan ke luar Kota; dan
  - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota.
- (2) Ke luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu melewati batas wilayah administratif Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan

sw  
f R A



- b. dilaksanakan melebihi 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan kantor.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar Kota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah tertulis/disposisi dari Bupati.
- (2) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas dalam kota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah tertulis/disposisi dari Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Pejabat berwenang yang memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan, maka pemberian persetujuan tertulis/disposisi dapat didelegasikan kepada pejabat eselon satu tingkat dibawahnya sesuai hierarki.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPT dan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati untuk Bupati;
  - b. Wakil Bupati untuk Wakil Bupati;
  - c. Bupati/Wakil Bupati untuk Sekretaris Daerah;
  - d. Ketua DPRD untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
  - e. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD untuk anggota DPRD;
  - f. Sekretaris Daerah untuk para Asisten Sekretaris Daerah dan staf ahli;
  - g. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah untuk Kepala Bagian pada Sekretaris Daerah;
  - h. Kepala Bagian pada Sekretaris Daerah untuk Pelaksana Perjalanan Dinas pada satuan kerja berkenaan;
  - i. Kepala Perangkat Daerah untuk dirinya sendiri dan pelaksana Perjalanan Dinas pada satuan kerja berkenaan; dan

f A R



- j. Kepala UPTD untuk dirinya sendiri dan pelaksana Perjalanan Dinas pada unit kerja berkenaan.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan ke luar Kota yaitu pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali bagi kepala UPTD dan pelaksana Perjalananan Dinas pada unit kerja berkenaan kewenangannya berada pada Kepala Perangkat Daerah.
  - (4) Dalam hal pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, kewenangan penerbitan SPT dan SPPD dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk yaitu :
    - a. Pejabat eselon setingkat lebih tinggi; atau
    - b. Pejabat eselon satu tingkat dibawahnya sesuai hierarki.
  - (5) Pembebanan biaya Perjalanan Dinas dicantumkan pada SPPD.
  - (6) Pejabat berwenang yang memberikan SPT dan SPPD bertanggung jawab atas efisiensi, efektivitas dan ekonomis terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
  - (7) Format SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5) diubah, serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Uang harian dibayarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan:
  - a. dalam Kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; atau
  - b. luar Kota.
- (2) Pembayaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara *lumpsum* sesuai dengan jumlah hari *Riil* pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam SPT.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi dari 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Kota diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dihapus.
- (5) Besaran pemberian Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan ke luar Kota, dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam dan mengikuti

f a <sup>o</sup> a



pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari;
  - a. biaya transportasi darat;
  - b. biaya taksi; dan
  - c. biaya tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil / *at cost*.
- (3) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. biaya transportasi darat satu kali jalan dari tempat kedudukan di Ibu Kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya; atau
  - b. biaya transportasi darat satu kali jalan antar kota antar provinsi dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan pada provinsi yang berbeda atau sebaliknya.
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan yaitu:
  - a. biaya taksi keberangkatan :
    1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
    2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
  - b. biaya taksi kepulangan:
    1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
    2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

FAR  
R



- (6) Biaya tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya tiket berdasarkan fasilitas moda transportasi dan jenis kelas angkutan pergi pulang dari bandara/terminal/stasiun/pelabuhan keberangkatan suatu kota ke bandara/terminal/stasiun pelabuhan kota tujuan.
- (7) Komponen biaya transportasi darat, biaya taksi, dan biaya tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya tol, biaya bagasi pesawat dan/atau retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (8) Besaran satuan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Ketentuan dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (10) Dalam hal satuan biaya transportasi darat belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- (11) Dalam hal perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan dan/atau keberangkatan dari tempat kedudukan ke bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun dan kembali ketempat kedudukan mempergunakan kendaraan pribadi, diberikan biaya bahan bakar minyak sebagai pengganti biaya transport maksimal sesuai standar bahan bakar minyak yang berlaku dan/atau dihitung berdasarkan bukti pembelian bahan bakar minyak dengan pertimbangan jenis kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar kendaraan dinas dan jarak tempuh yang dibayarkan secara riil/*at cost* dengan melampirkan bukti transaksi/pengeluaran yang sah.
- (12) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan dengan menggunakan

FR  
A



kendaraan dinas dan telah mendapatkan biaya bahan bakar minyak operasional rutin, maka tidak diberikan biaya transportasi.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a, ayat (5), dan ayat (6) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Ketentuan pemberian biaya penginapan yaitu :
  - a. dibayarkan sesuai biaya *Riil* berdasarkan jumlah hari yang digunakan;
  - b. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain;
  - c. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas; dan
  - d. diberikan kepada Pejabat/ Pegawai dan/atau Pimpinan/ Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/ kursus/ *workshop*/ seminar/ pelatihan/ bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana Perjalanan Dinas; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan dalam hal:
  - a. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket *fullboard*; atau





- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan penginapan oleh panitia penyelenggara sesuai bukti riil.
- (5) Penyetaraan tingkat biaya penginapan untuk pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, ditentukan oleh PA/KPA yang menanggung pembebanan biaya Perjalanan Dinas berkenaan sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
  - (6) Besaran satuan biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (7) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana Perjalanan dapat menginap pada penginapan yang sama.
  - (8) Dalam hal biaya penginapan pada penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih tinggi dari satuan biaya penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana Perjalanan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada penginapan dimaksud.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Uang harian peserta dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan paket *meeting* dalam kota/ luar kota (*fullboard/ fullday/ halfday/ residence*) dibayarkan sebesar uang harian paket *meeting* sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan rapat, seminar dan sejenisnya.
- (2) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/ diseminasi/ *workshop/ focus group discussion / pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan* yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat.
- (3) Besaran uang harian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





- (4) Mekanisme dan pelaksanaan kegiatan paket *meeting* mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf f, dan huruf g diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan :
- a. pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Pemberi Tugas; dan
  - b. biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampiri dokumen:
- a. surat perintah yang sah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. bukti tiket, *boarding pass* pesawat/kapal air/kereta/bus, bukti biaya masuk/retribusi/*airport tax* bandar udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
  - d. bukti pembayaran uang harian dan uang representasi cukup dengan lampiran tanda terima yang mencantumkan seluruh pembiayaan yang diketahui oleh PA/KPA;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota atau sewa kendaraan ke luar Kota, berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya dan/atau surat pernyataan tidak menggunakan biaya penginapan oleh pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - g. daftar pengeluaran *riil* sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf f tidak diperoleh/ hilang/ rusak/ mengalami musibah/ pencurian/ kondisi tertentu lainnya sehingga bukti pengeluaran Riil sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kuitansi, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan menyatakan bahwa daftar pengeluaran dimaksud adalah pengganti bukti pengeluaran yang hilang/rusak dan/atau yang sulit diperoleh, yang disetujui oleh PA/KPA.

11. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI KARANGASEM, *JW*



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

*[Handwritten signature of I Ketut Sedana Merta]*  
I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 36

*[Handwritten initials]*



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

I. BESARAN UANG HARIAN KE LUAR KOTA DAN UANG HARIAN DIKLAT

NO	PROVINSI	SATUAN	KE LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	360,000	110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	110,000
3	RIAU	OH	370,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	110,000
5	JAMBI	OH	370,000	110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	110,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	110,000
9	BENGKULU	OH	380,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	120,000
11	BANTEN	OH	370,000	110,000
12	JAWA BARAT	OH	430,000	130,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000	160,000
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	110,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000	130,000
16	JAWA TIMUR	OH	410,000	120,000
17	BALI	OH	480,000	140,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	130,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	130,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	110,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	110,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	110,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	130,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	130,000
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000	110,000
26	GORONTALO	OH	370,000	110,000
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000	120,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	130,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	110,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	110,000
31	MALUKU	OH	380,000	110,000
32	MALUKU UTARA	OH	430,000	130,000
33	PAPUA	OH	580,000	170,000
34	PAPUA BARAT	OH	480,000	140,000



## II. BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN UANG HARIAN DIKLAT

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN DIKLAT
1	2	3	4	
1	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam	OH	190.000	140.000

BUPATI KARANGASEM, *sdh*



I GEDE DANA

*cr*



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS JABATAN

I. BIAYA TRANSPORTASI DARAT

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
<b>ACEH</b>				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275,000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298,000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183,000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238,000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325,000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420,000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315,000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293,000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460,000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289,000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270,000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278,000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220,000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370,000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275,000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190,000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205,000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301,000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240,000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400,000
<b>SUMATERA UTARA</b>				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259,000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225,000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270,000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186,000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300,000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200,000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287,000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360,000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300,000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186,000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420,000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420,000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420,000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300,000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330,000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200,000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264,000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328,000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345,000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330,000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300,000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180,000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225,000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345,000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285,000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203,000
RIAU				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380,000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315,000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200,000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300,000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225,000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350,000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322,000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350,000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400,000
KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185,000
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175,000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270,000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325,000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260,000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170,000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241,000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225,000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190,000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250,000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308,000
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225,000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250,000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225,000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205,000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250,000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250,000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205,000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225,000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210,000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250,000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220,000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215,000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210,000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200,000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225,000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215,000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210,000
<b>SUMATERA SELATAN</b>				
84	Palembang	Kab. Banvuasin	Orang/Kali	203,000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315,000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250,000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235,000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235,000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320,000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325,000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205,000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205,000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248,000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250,000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245,000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265,000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290,000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280,000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205,000
<b>LAMPUNG</b>				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270,000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234,000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246,000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246,000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252,000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276,000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216,000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200,000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222,000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240,000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252,000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267,000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270,000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234,000
<b>BENGGULU</b>				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344,000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232,000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313,000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385,000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298,000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375,000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423,000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313,000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282,000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
<b>BANGKA BELITUNG</b>				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250,000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275,000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275,000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250,000
<b>DKI JAKARTA</b>				
127	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284,000
128	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284,000
129	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300,000
130	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300,000
131	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275,000
132	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286,000
133	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286,000
134	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310,000
135	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428,000
<b>BANTEN</b>				
136	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208,000
137	Serang	Kab. Pandegiang	Orang/Kali	138,000
138	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160,000
139	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254,000
140	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160,000
141	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313,000
142	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347,000
<b>JAWA BARAT</b>				
143	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183,000
144	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275,000
145	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265,000
146	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185,000
147	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245,000
148	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215,000
149	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280,000
150	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243,000
151	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275,000
152	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248,000
153	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275,000
154	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235,000
155	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283,000
156	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218,000
157	Bandung	Kab. Subalg	Orang/Kali	208,000
158	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245,000
159	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230,000
160	Bandung	Kab. Tasikmalava	Orang/Kali	245,000
161	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283,000
162	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265,000
163	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285,000
164	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168,000
165	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270,000
166	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275,000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
167	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226,000
168	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245,000
<b>JAWA TENGAH</b>				
169	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260,000
170	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257,000
171	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240,000
172	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270,000
173	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240,000
174	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263,000
175	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280,000
176	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230,000
177	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235,000
178	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240,000
179	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250,000
180	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260,000
181	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230,000
182	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250,000
183	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235,000
184	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240,000
185	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240,000
186	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245,000
187	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250,000
188	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270,000
189	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250,000
190	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250,000
191	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230,000
192	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250,000
193	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250,000
194	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260,000
195	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240,000
196	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250,000
197	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250,000
198	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240,000
199	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245,000
200	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235,000
201	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245,000
202	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260,000
<b>D.I. YOGYAKARTA</b>				
203	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250,000
204	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350,000
205	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350,000
206	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200,000
<b>JAWA TIMUR</b>				
207	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225,000
208	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285,000
209	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255,000
210	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225,000
211	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255,000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
212	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225,000
213	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261,000
214	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235,000
215	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235,000
216	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225,000
217	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261,000
218	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245,000
219	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253,000
220	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228,000
221	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225,000
222	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245,000
223	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253,000
224	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285,000
225	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243,000
226	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228,000
227	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255,000
228	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228,000
229	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235,000
230	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240,000
231	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255,000
232	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255,000
233	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245,000
234	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245,000
235	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245,000
236	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242,000
237	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255,000
238	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225,000
239	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235,000
240	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245,000
241	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228,000
242	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225,000
243	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228,000
<b>BALI</b>				
244	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188,000
245	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225,000
246	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265,000
247	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225,000
248	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270,000
249	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263,000
250	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225,000
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>				
251	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325,000
252	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450,000
253	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350,000
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>				
254	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325,000
255	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175,000
256	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218,000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
257	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275,000
<b>KALIMANTAN BARAT</b>				
258	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270,000
259	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550,000
260	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550,000
261	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550,000
262	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185,000
263	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270,000
264	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430,000
265	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230,000
266	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300,000
267	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303,000
268	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343,000
269	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392,000
270	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257,000
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>				
271	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290,000
272	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333,000
273	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425,000
274	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300,000
275	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275,000
276	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250,000
277	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425,000
278	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300,000
279	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525,000
280	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448,000
281	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250,000
282	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328,000
283	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525,000
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>				
284	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230,000
285	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170,000
286	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200,000
287	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200,000
288	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212,000
289	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218,000
290	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290,000
291	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234,000
292	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300,000
293	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200,000
294	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189,000
295	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225,000
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>				
296	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1,500,000
297	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500,000
298	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1,350,000
299	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1,650,000
300	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650,000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
301	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550,000
302	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600,000
<b>SULAWESI UTARA</b>				
303	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250,000
304	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275,000
305	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250,000
306	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300,000
307	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180,000
308	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180,000
309	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200,000
310	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175,000
311	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175,000
312	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250,000
313	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170,000
<b>GORONTALO</b>				
314	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400,000
315	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300,000
316	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350,000
317	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	
<b>SULAWESI BARAT</b>				
318	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240,000
319	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359,000
320	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200,000
321	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270,000
322	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260,000
<b>SULAWESI SELATAN</b>				
323	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235,000
324	Makasar	Kab. Barru	Orang/Kali	210,000
325	Makasar	Kab. Bone	Orang/Kali	240,000
326	Makasar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240,000
327	Makasar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250,000
328	Makasar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175,000
329	Makasar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230,000
330	Makasar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350,000
331	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375,000
332	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365,000
333	Makasar	Kab. Maros	Orang/Kali	170,000
334	Makasar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230,000
335	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230,000
336	Makasar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235,000
337	Makasar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235,000
338	Makasar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190,000
339	Makasar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350,000
340	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350,000
341	Makasar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230,000



NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
342	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	350,000
343	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225,000
SULAWESI TENGAH				
344	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400,000
345	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472,000
346	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130,000
347	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400,000
348	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400,000
349	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250,000
350	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280,000
351	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219,000
352	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350,000
353	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	
SULAWESI TENGGARA				
354	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355,000
355	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370,000
356	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300,000
357	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425,000
358	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300,000
359	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305,000
360	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300,000
MALUKU UTARA				
361	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850,000
362	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1,000,000
363	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1,250,000
364	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900,000
PAPUA				
365	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600,000
366	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900,000
367	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2,700,000
368	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1,134,000
PAPUA BARAT				
369	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900,000
370	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750,000
371	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2,650,000
372	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1,000,000

NO	KOTA KEDUDUKAN	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
373	Karangasem	Kab. Jembrana	Orang/Kali	378.000,00
374	Karangasem	Kab. Badung	Orang/Kali	303.000,00
375	Karangasem	Kab. Tabanan	Orang/Kali	325.000,00
376	Karangasem	Kota Denpasar	Orang/Kali	263.000,00
377	Karangasem	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000,00
378	Karangasem	Kab. Gianyar	Orang/Kali	243.000,00
379	Karangasem	Kab. Bangli	Orang/Kali	228.000,00
380	Karangasem	Kab. Klungkung	Orang/Kali	190.000,00



## II. BIAYA TAKSI

NO.	PROVINSI	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ACEH	123,000	<i>Orang/ Kali</i>
2.	SUMATERA UTARA	232,000	<i>Orang/ Kali</i>
3.	RIAU	94,000	<i>Orang/ Kali</i>
4.	KEPULAUAN RIAU	137,000	<i>Orang/ Kali</i>
5.	JAMBI	147,000	<i>Orang/ Kali</i>
6.	SUMATERA BARAT	190,000	<i>Orang/ Kali</i>
7.	SUMATERA SELATAN	128,000	<i>Orang/ Kali</i>
8.	LAMPUNG	167,000	<i>Orang/ Kali</i>
9.	BENGKULU	109,000	<i>Orang/ Kali</i>
10.	BANGKA BELITUNG	90,000	<i>Orang/ Kali</i>
11.	BANTEN	446,000	<i>Orang/ Kali</i>
12.	JAWA BARAT	166,000	<i>Orang/ Kali</i>
13.	D.K.I. JAKARTA	256,000	<i>Orang/ Kali</i>
14.	JAWA TENGAH	75,000	<i>Orang/ Kali</i>
15.	D.I. YOGYAKARTA	118,000	<i>Orang/ Kali</i>
16.	JAWA TIMUR	194,000	<i>Orang/ Kali</i>
17.	BALI	159,000	<i>Orang/ Kali</i>
18.	NUSA TENGGARA BARAT	231,000	<i>Orang/ Kali</i>
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	108,000	<i>Orang/ Kali</i>
20.	KALIMANTAN BARAT	135,000	<i>Orang/ Kali</i>
21.	KALIMANTAN TENGAH	111,000	<i>Orang/ Kali</i>
22.	KALIMANTAN SELATAN	150,000	<i>Orang/ Kali</i>
23.	KALIMANTAN TIMUR	450,000	<i>Orang/ Kali</i>
24.	KALIMANTAN UTARA	102,000	<i>Orang/ Kali</i>
25.	SULAWESI UTARA	138,000	<i>Orang/ Kali</i>
26.	GORONTALO	240,000	<i>Orang/ Kali</i>
27.	SULAWESI BARAT	313,000	<i>Orang/ Kali</i>
28.	SULAWESI SELATAN	145,000	<i>Orang/ Kali</i>
29.	SULAWESI TENGAH	165,000	<i>Orang/ Kali</i>
30.	SULAWESI TENGGARA	171,000	<i>Orang/ Kali</i>
31.	MALUKU	240,000	<i>Orang/ Kali</i>
32.	MALUKU UTARA	215,000	<i>Orang/ Kali</i>
33.	PAPUA	431,000	<i>Orang/ Kali</i>
34.	PAPUA BARAT	182,000	<i>Orang/ Kali</i>



### III. BIAYA TIKET BERDASARKAN FASILITAS TRANSPORTASI PERGI PULANG

#### a. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	KOTA TUJUAN	KELAS		KET
		BISNIS*	EKONOMI*	
1	2	3	4	5
1.	Denpasar - Jakarta	5,305,000	3,262,000	PP
2.	Denpasar - Medan	10,589,000	5,658,000	PP
3.	Denpasar - Batam	8,450,000	4,824,000	PP
4.	Denpasar - Yogyakarta	3,861,000	2,481,000	PP
5.	Denpasar - Makassar	4,182,000	2,631,000	PP
6.	Denpasar - Biak	16,729,000	8,995,000	PP
7.	Denpasar - Jayapura	11,680,000	6,845,000	PP
8.	Denpasar - Kendari	5,455,000	3,273,000	PP
9.	Denpasar - Mataram	1,840,000	1,390,000	PP
10.	Denpasar - Padang	9,049,000	4,888,000	PP
11.	Denpasar - Palangkaraya	8,557,000	4,909,000	PP
12.	Denpasar - Palembang	7,541,000	4,278,000	PP
13.	Denpasar - Pekanbaru	9,092,000	4,942,000	PP
14.	Denpasar - Pontianak	7,990,000	4,738,000	PP
15.	Denpasar - Kupang	5,091,000	2,952,000	PP
16.	Denpasar - Timika	10,140,000	6,129,000	PP
17.	Denpasar - Manado	7,851,000	4,278,000	PP
18.	Denpasar - Surabaya	3,198,000	1,979,000	PP
19.	Denpasar - Banda Aceh	10,835,000	6,279,000	PP
20.	Denpasar - Banjarmasin	8,792,000	4,920,000	PP
21.	Denpasar - Bandung	5,626,000	3,252,000	PP
22.	Denpasar - Lampung	6,236,000	3,647,000	PP
23.	Denpasar - Ambon	8,054,000	4,471,000	PP
24.	Denpasar - Balikpapan	10,739,000	5,648,000	PP
25.	Denpasar - Jambi	7,733,000	4,439,000	PP
				PP/At Cost

#### b. SATUAN BIAYA TIKET PENYEBERANGAN BOAT ( dalam rupiah )

NO.	DAERAH TUJUAN	PAGU MAKSIMAL	KET
1.	NUSA PENIDA	250,000	PP

#### Keterangan :

- Biaya tiket termasuk airport tax dibayarkan secara riil untuk semua daerah tujuan
- \* Dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

A BUPATI KARANGASEM, 

  
I GEDE DANA





LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM NEGERI

I. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN KE LUAR KOTA

NO	PROVINSI TUJUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN II / I/ PEGAWAI TIDAK TETAP
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000
2	SUMATERA UTARA	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000
3	RIAU	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
4	KEPULAUAN RIAU	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000
5	JAMBI	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000
6	SUMATERA BARAT	5,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000
7	SUMATERA SELATAN	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
8	LAMPUNG	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000
9	BENGKULU	2,071,000	1,628,000	1,546,000	630,000	630,000
10	BANGKA BELITUNG	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000
11	BANTEN	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000	718,000
12	JAWA BARAT	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000
13	D.K.I. JAKARTA	5,850,000	1,490,000	992,000	730,000	730,000
14	JAWA TENGAH	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000	600,000
15	DI.YOGYAKARTA	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
16	JAWA TIMUR	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000
17	BALI	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000	910,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000
20	KALIMANTAN BARAT	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
21	KALIMANTAN TENGAH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000



NO	PROVINSI TUJUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN N IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN N III	GOLONGAN II / I/ PEGAWAI TIDAK TETAP
1	2	3	4	5	6	7
22	KALIMANTAN SELATAN	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000
23	KALIMANTAN TIMUR	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
24	KALIMANTAN UTARA	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
25	SULAWESI UTARA	4,919,000	2,290,000	924,000	782,000	782,000
26	GORONTALO	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000
27	SULAWESI BARAT	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000
28	SULAWESI SELATAN	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732,000	732,000
29	SULAWESI TENGAH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000
30	SULAWESI TENGGARA	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000
31	MALUKU	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
32	MALUKU UTARA	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600,000	600,000
33	PAPUA	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000
34	PAPUA BARAT	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718,000	718,000

- Pembiayaan satuan biaya penginapan dalam negeri dilaksanakan dengan Riil

A BUPATI KARANGASEM,

f I GEDE DANA



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

UANG HARIAN PESERTA PAKET MEETING DILUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DALAM / KE LUAR KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DALAM KOTA	RESIDENCE DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	120,000	85,000	120,000
2	SUMATERA UTARA	OH	130,000	95,000	130,000
3	RIAU	OH	130,000	85,000	130,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130,000	95,000	130,000
5	JAMBI	OH	130,000	95,000	130,000
6	SUMATERA BARAT	OH	120,000	95,000	120,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120,000	95,000	120,000
8	LAMPUNG	OH	130,000	95,000	130,000
9	BENGKULU	OH	130,000	95,000	130,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130,000	95,000	130,000
11	BANTEN	OH	120,000	85,000	120,000
12	JAWA BARAT	OH	150,000	105,000	150,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180,000	130,000	180,000
14	JAWA TENGAH	OH	130,000	95,000	130,000
15	DI.YOGYAKARTA	OH	140,000	100,000	140,000
16	JAWA TIMUR	OH	140,000	100,000	140,000
17	BALI	OH	150,000	115,000	150,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150,000	105,000	150,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140,000	100,000	140,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130,000	95,000	130,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120,000	85,000	120,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130,000	95,000	130,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150,000	105,000	150,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150,000	105,000	150,000
25	SULAWESI UTARA	OH	130,000	85,000	130,000
26	GORONTALO	OH	130,000	95,000	130,000
27	SULAWESI BARAT	OH	130,000	85,000	130,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150,000	105,000	150,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130,000	95,000	130,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130,000	95,000	130,000
31	MALUKU	OH	120,000	85,000	120,000
32	MALUKU UTARA	OH	130,000	95,000	130,000
33	PAPUA	OH	200,000	140,000	200,000
34	PAPUA BARAT	OH	160,000	115,000	160,000

BUPATI KARANGASEM, 

  
 I GEDE DANA





LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN BIAYA PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 NIP. : .....  
 Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : ..... tanggal ..... ,  
 dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama melaksanakan  
 perjalanan dinas dari tanggal ..... s/d ..... , tidak menggunakan biaya  
 penginapan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila  
 dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan  
 kerugian daerah saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian  
 tersebut ke Kas Daerah.

....., tanggal, bulan, tahun  
 Yang melaksanakan perjalanan dinas,

Materai  
 Rp. 10000

( Nama Jelas )  
 Nip.

BUPATI KARANGASEM, 

  
 I GEDE DANA

f



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Pangkat/Gol : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal .....,  
 dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya Transport dan/atau biaya pengingapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1(satu) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)

( Nama Jelas )  
 Nip.

....., tanggal, bulan, tahun  
 Yang melaksanakan perjalanan dinas,

Materai  
 Rp. 10000

( Nama Jelas )  
 Nip.

Disetujui/disahkan,  
 Pengguna Anggaran/Kuasa  
 Pengguna Anggaran (PA/KPA),

( Nama Jelas )  
 Nip.

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA